

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adjie, Habib, 2000. *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*. Mandar Maju, Bandung.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Perangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Satrio, J.S, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sofwan, Sri Sudewi Masjchoen, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta.

_____, 1981, *Hak Jaminan Atas Tanah* PT Liberty Offset, cetakan ke IV, Yogyakarta.

Sumardjono, Maria S.W, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Sutedi, Andrian, 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika Offset, Cetakan Pertama, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 1998, *Pasal-pasal tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*, viii, Djambatan, Jakarta.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.

Peraturan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

3. Jurnal/Artikel/Skripsi/Tesis

Ardani, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Di Kota Yogyakarta", *Tesis* Program Studi Megister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. 2011.

Danakusuma, Tutik, "Pendaftaran Hak Tanggungan Di Kantor Pertanahan Kota Denpasar", *Tesis* Program Studi Megister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. 2009.

Tandi, Sukwanto, "Jangka Waktu Proses Pendaftaran Hak Tanggungan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Kreditor (Studi Kasus Di Kota Makassar)", 2009.

4. Internet

Jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/repertorium/article/html

<http://safriawal.blogspot.co.id/2016/01/implikasi-keterlambatan-pendaftaran.html>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl944/apht-%28akte-pemberian-hak-tanggungan.html>

<http://kbbi.web.id/narasumber.html>.

<http://kbbi.web.id/subyek.html>.